



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2018 – 2019
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Senin, 18 Maret 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 sampai awal bulan Maret 2019 Kementerian Perhubungan.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, M.Si
Hadir Anggota	: dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN TA 2019 sampai awal Maret 2019 Kementerian Perhubungan.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami serapan anggaran dalam APBN TA 2019 Kementerian Perhubungan sampai dengan 14 Maret 2019 sebesar 5,17%. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian kinerja dalam APBN TA 2019 sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
2. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan upaya-upaya dalam membuka blokir anggaran antara lain dengan melengkapi data dukung perencanaan, memfinalisasikan Rekomposisi Usulan kegiatan SBSN, menyampaikan usulan revisi pada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan pada batas waktu tertentu, ataupun mengkaji potensi relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhannya.
3. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mempercepat realisasi program-program berbasis masyarakat antara lain pengadaan bus dan program sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing SDM bidang perhubungan oleh BPSDM Perhubungan.
4. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan selaku regulator untuk mengawasi tarif seluruh moda transportasi agar harganya terjangkau oleh masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap *multiplier effect* di bidang ekonomi.
5. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi pemeliharaan jalur rel di seluruh Indonesia sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan keamanan sektor perkeretaapian.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 18 Maret 2019

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

  
**BUDI KARYA SUMADI**

**KETUA RAPAT,**

  
**FARY DJEMY FRANCIS**